

**PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN (REVISI) ANGGARAN  
BELANJA KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN BARU DI MASA  
PANDEMI *COVID-19* TAHUN ANGGARAN 2020  
(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  
Sumatera Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

LAMRIA SINAMBELA  
07011281722086

Konsentrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN (REVISI) ANGGARAN  
BELANJA KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN BARU DI MASA  
PANDEMI *COVID-19* TAHUN ANGGARAN 2020  
(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  
Sumatera Selatan)**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**LAMRIA SINAMBELA  
07011281722086**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2021**


**Pembimbing I**

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si  
NIP. 196511171990031004**



**Pembimbing II**

**Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN (REVISI) ANGGARAN  
BELANJA KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN BARU DI MASA  
PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020  
(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  
Sumatera Selatan)**

**SKRIPSI**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada tanggal bulan tahun  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si**  
Ketua

**Ermanovida, S.Sos., M.Si**  
Anggota

**Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM**  
Anggota

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
Anggota



Indralaya, November 2021  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya  
Dekan,



**Prof. Dr. Alftri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

“Semakin cermat dan detail dalam proses penyusunan anggarannya, maka akan semakin mudah untuk menjalankan kegiatannya”

(John Doe)

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yang Maha Esa, Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Ibu ku tercinta, Ibu L. Simarmata
3. Keluarga Besarku
4. Teman Seperjuangan AP 2017
5. Almamater Kebanggaanku

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses penyusunan perubahan (Revisi) anggaran kegiatan kewirausahaan baru di masa pandemi covid-19 tahun anggaran 2020 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sumatera Selatan. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perubahan anggaran belanja pada kegiatan kewirausahaan baru yang mengakibatkan belanja barang dan jasa dan wirausaha yang dilatih berkurang dalam volume kegiatannya serta mengharuskan dinas untuk melakukan perubahan anggaran di tahun anggaran berjalan oleh karena itu perlu diteliti bagaimana proses penyusunan kegiatan kewirausahaan baru dengan menggunakan konsep Deddi Nordiawan yang terdiri dari empat dimensi diantaranya penetapan strategi organisasi, pembuatan tujuan, penetapan aktivitas, evaluasi dan pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan analisis data proses perubahan (Revisi) anggaran kegiatan kewirausahaan baru pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa ada penyesuaian di dalam target anggaran dan volume kegiatan di tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam proses penyusunan perubahan (Revisi) anggaran sebaiknya lebih ditingkatkan lagi komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam penyusunan perubahan (Revisi) anggaran agar program maupun kegiatan dapat berjalan lebih baik dan realisasi anggaran dapat lebih maksimal kedepannya selanjutnya diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam penyusunan anggaran pada tahun-tahun berikutnya agar lebih efisien dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Proses penyusunan perubahan (Revisi) anggaran, Covid-19

### Pembimbing I



**Dr. Ardyan Saptawan, M.Si**  
NIP.196511171990031004

### Pembimbing II



**Ermanovida S.Sos., M.Si**  
NIP. 196911191998032001

Indralaya, November 2021  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



  
**Lailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA**  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to describe the process of preparing budget changes for new entrepreneurial activities during the covid 19 pandemic for budget year 2020 in department of manpower and transmigration of South Sumatera. The background of this research was about the budget changes for the a new entrepreneurial activities which resulted in the expenditure of goods and services and the entrepreneurs being trained was reduced in the volume of their activities and requiring the agency to make budget change in the current budget year, therefore it was necessary to examine how the process of preparing budget changes for new entrepreneurial activities using the concept from Deddi Nordiawan consists of four dimensions including organizational strategy making, goal making, activity making, evaluation and decision making. The research used qualitative method. Based on the result of data analysis process of preparing budget changes for new entrepreneurial activities during the covid 19 pandemic, it shows that there are adjustments in the budget targets and volume of activities in 2020 based on Presidential Regulation Number 72 of 2020. From the results of this study it is recommended that in the process of preparing budget changes it is better to be more communication and coordination with parties involved in the preparation of budget changes so that programs and activities can run better and budget realization can be maximized in the future are expected to maintain and improve performance in budgeting in the following years to be more efficient and effective in accordance with applicable regulation.*


*Keyword: process of preparing budget changes, covid-19*

**Advisor I**

  
**Dr. Ardyan Saptawan, M.Si**  
**NIP.196511171990031004**

**Advisor II**

  
**Ermanovida S.Sos., M.Si**  
**NIP. 196911191998032001**

**Judralaya, November 2021**  
**Chairman Of Department Public Administration**  
**Faculty Of Social and Political Science**  
**University Of Sriwijaya**  
  
**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA**  
**NIP. 198108272009121002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada TYME atas segala berkat rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Proses Penyusunan Perubahan (Revisi) Anggaran Belanja Kegiatan Kewirausahaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Tahun Ajaran 2021/2022.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dengan adanya semangat, bantuan serta bimbingan sehingga semua hambatan serta kesulitan tersebut dapat terlewati dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterimakasih kepada semua pihak yang telah mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan serta kemudahan dalam setiap proses skripsi ini dan selalu menopang, membangkitkan semangat setiap penulis mengalami keterpurukan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
2. Alm. Ayahku tercinta, Bapak B. Sinambela yang selama hidupnya selalu mendukung penulis dengan caranya sendiri, mendoakan, dan selalu bertanggungjawab terhadap apapun yang penulis butuhkan. Ini untukmu ayah semoga engkau bangga melihatku dari sorga dapat menyelesaikan studiku dan memakai toga di acara wisudaku nanti.
3. Ibuku tercinta, Ibu Ledia Simarmata yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan semangat dan bantuan moril kepada penulis. Terimakasih Ibu sudah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, ini untukmu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, sehat selalu agar aku bisa membahagiakanmu kelak.
4. Kakakku tersayang, Efritawida Sinambela yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan bantuan moril kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Sriwijaya. Terimakasih kak. Tidak ada yang bisa aku ucapkan selain ucapan terima kasih buat setiap perjuangan dan semua yang telah engkau korbakan untukku. Aku menyayangimu, Tuhan Yesus menyertaimu.
5. Saudara-saudaraku tersayang, Mesdiani Sinambela, Enris Sinambela, Erwin Sinambela, Linawati Sinambela, Efritawida Sinambela dan Flora Sinambela yang selalu mendoakan, mendukung setiap prosesnya, dan selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
6. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof.Ir.H. Anis Sagaff, MSCE.
7. Bapak Prof. Dr. Alfitri,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya dan Ibu Ermanovida, S.Sos.,M.Si selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai dosen pembimbing II skripsi penulis.
9. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta dengan kesabaran dan ketulusan hati mendukung, membimbing, menginspirasi dan mengajari selama proses penyusunan skripsi ini.

10. Bapak dan ibu Dosen Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebut satu persatu beserta Staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang terlibat dari awal sampai akhir perkuliahan ini.
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Bapak Drs. H. Koimudin, S.H.,MM beserta staf Tata Usaha (TU) yang telah memberikan izin penelitian.
12. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bapak H.Mansyur Husin dan semua staf yang telah membantu dan memberikan semua data yang dibutuhkan terkait penelitian skripsi.
13. Teman dekatku, Arsita Goretthi Hutabarat, Helen Pranika, Sri Maharani, Dini Anggraini, dan Rahmi Zulfitri yang saling mendukung, berkeluh kesah, teman cerita dan selalu memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis dari awal sampai akhir perkuliahan skripsi ini.
14. Teman sepembimbinganku, Anugerah Fitriyah, Meliana Agustin, Arsita Goretthi Hutabarat, Ayu, Anisa, Risa, Faisal, Setio daffa, Yoga, kevin, Fikri yang saling mendukung dan menyemangati dalam proses skripsi ini. Semangat buat kalian, Aku menyayangi kalian semua.
15. Adikku tersayang, Rotua Natalia Manalu teman satu kosanku yang selalu mendoakan dan yang telah banyak memberikan semangat dan hiburan tentunya dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih sudah memberikan banyak pelajaran juga bagi penulis, mengajarkan untuk selalu mengatakan hal-hal yang positif dan hal-hal yang memang kita harapkan. Dan terbukti penulis bisa menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Terimakasih sudah selalu sabar menghadapi penulis. Semangat buat mu dan semoga cepat menyusul ya. Aku menyayangimu, Tuhan Yesus Memberkatimu selalu.
16. Adikku tersayang, Sari Natalina Sitorus dan Polaria Anastasya Situmeang yang selalu mendoakan, dan yang telah banyak membantu penulis tentunya dan yang selalu bersedia untuk direpotkan, adik-adikku yang selalu ada di masa suka maupun dukaku, dan yang selalu mendengarkan keluh kesahku, yang selalu menyemangatiku sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak buat kalian berdua. Semangat buat kalian, kalau aku bisa, kalian juga bisa. Semoga cepat menyusul ya. Aku menyayangi kalian. Tuhan Yesus memberkati.
17. Temanku tersayang, Mutiara Larasati Sihaloho dan Nengsih Anggriani Situmorang teman seperjuanganku yang selalu mendoakan, dan yang telah banyak memberikan motivasi yang menginspirasi, selalu ada di saat terpurukku, memberikan semangat dan selalu sabar mendengarkan setiap keluh kesahku. Terima kasih buat kalian berdua. Aku menyayangi kalian. Tuhan Yesus memberkati.
18. Keluargaku, Sektor Muhajirin yang selama ini memberikan semangat dan memberikan hiburan selama perkuliahan di Universitas Sriwijaya.
19. Teman-teman seperjuangan, Ilmu Administasi Publik 2017 yang sering direpotkan dan memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. Semua pihak yang telah membantu baik lewat doa maupun perbuatan sehingga skripsi ini selesai.



Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan serta penulis mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kemudahan kepada kita semua dalam segala hal. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, November 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'J. M.' or similar initials.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Ilmu Administrasi Publik Hubungannya Dengan Keuangan Publik .....	10
2. Anggaran .....	11
3. Proses Penyusunan Perubahan Anggaran .....	16
4. Kegiatan Kewirausahaan Baru .....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	28
C. Teori Operasional yang Digunakan .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Definisi Konsep .....	33
C. Fokus Penelitian.....	33

D. Jenis Dan Sumber Data.....	35
E. Informan Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Pemeriksaan Data.....	36
H. Teknik Analisis Data.....	36
I. Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	41
1. Sejarah Singkat Pembentukan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan.....	41
2. Visi dan Misi Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan.....	44
B. Proses Penyusunan Perubahan (Revisi) Anggaran Belanja Kegiatan Kewirausahaan Baru Di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Tahun Anggaran 2020 (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan).....	51
1. Penetapan Strategi Organisasi.....	51
2. Pembuatan Tujuan.....	63
3. Penetapan Aktivitas.....	67
4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan.....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
1. Saran Teoritis.....	91
2. Saran Praktis.....	91

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Rincian Perubahan Belanja Langsung Kegiatan Kewirausahaan Baru Tahun Anggaran 2020 .....	8
<b>Tabel 2.</b>	Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penysusunan anggaran .....	28
<b>Tabel 3.</b>	Fokus Penelitian .....	35
<b>Tabel 4.</b>	Komposisi pegawai Disnakertrans Provinsi Sumsel Berdasarkan Golongan .....	47
<b>Tabel 5.</b>	Komposisi pegawai Disnakertrans Provinsi Sumsel Berdasarkan Jenis Kelamin .....	48
<b>Tabel 6.</b>	Komposisi pegawai Disnakertrans Provinsi Sumsel Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	49
<b>Tabel 7.</b>	Rincian revisi anggaran belanja KWU TA 2020 .....	54
<b>Tabel 8.</b>	Rencana kerja anggaran satker rincian belanja satuan kerja TA 2020.....	55
<b>Tabel 9.</b>	Rincian anggaran KWU sebelum dan setelah perubahan .....	64
<b>Tabel 10.</b>	Rencana Kerja Program Peningkatan Kompetensi Kerja Dan Produktivitas TA 2020 .....	70
<b>Tabel 11.</b>	Rencana Kerja Program Peningkatan Kompetensi Kerja Dan Produktivitas TA 2020 Setelah Perubahan .....	70
<b>Tabel 12.</b>	Realisasi Keuangan Selatan Program Peningkatan Kompetensi Kerja Dan Produktivitas TA 2019 .....	71
<b>Tabel 13.</b>	Perubahan Belanja Barang Dan Jasa Kegiatan KWU Disnakertrans TA 2020 .....	85

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b>	Tren persentase Kemiskinan Sumsel dan Nasional September 2009-2019 .....	5
<b>Gambar 2.</b>	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2019 Provinsi Sumsel .....	5
<b>Gambar 3.</b>	Teori Operasional yang Digunakan .....	32
<b>Gambar 4.</b>	Lokasi Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan .....	40
<b>Gambar 5.</b>	Struktur Organisasi Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan .....	46
<b>Gambar 6.</b>	Alur Penyusunan Perubahan (Revisi) Anggaran KWU di Disnakertrans Provinsi Sumsel .....	56
<b>Gambar 7.</b>	Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Produktif .....	69
<b>Gambar 8.</b>	Usulan Revisi Penyesuaian Belanja Satker Ditjen Bina Lattas TA 2020 .....	77
<b>Gambar 9.</b>	Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran .....	77
<b>Gambar 10.</b>	Rencana Kerja Anggaran Satker Bagian A .....	78
<b>Gambar 11.</b>	Matriks Perubahan Semula-Menjadi .....	78
<b>Gambar 12.</b>	Rencana Kerja Anggaran Satker Bagian B .....	79
<b>Gambar 13.</b>	Rincian Kertas Kerja Satker .....	79
<b>Gambar 14.</b>	Alur Penyusunan Perubahan (Revisi) Anggaran KWU Di Disnakertrans Provinsi Sumsel .....	81
<b>Gambar 15.</b>	Aplikasi Sakti Revisi Anggaran TA 2020 .....	82
<b>Gambar 16.</b>	Rincian Belanja Barang Dan Jasa KWU Di Disnakertrans Provinsi Sumsel	86
<b>Gambar 17.</b>	Standar Biaya Umum Apliasi Sakti Di Disnakertrans .....	88

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2** : Matriks Pedoman Wawancara
- Lampiran 3** : Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2020 sebelum perubahan
- Lampiran 4** : Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan
- Lampiran 5** : Usulan Revisi penyesuaian Belanja SATKER Ditjen Binalattas Tahun Anggaran 2020
- Lampiran 6** : Rencana Kerja Anggaran SATKER Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2020 Bagian A
- Lampiran 7** : Rencana Kerja Anggaran SATKER Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2020 Bagian A
- Lampiran 8** : Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran
- Lampiran 9** : Matriks Perubahan (Semula-Menjadi) per Satuan Kerja
- Lampiran 10** : Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2020
- Lampiran 11** : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 12** : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 Akibat *Covid-19*
- Lampiran 13** : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
- Lampiran 14** : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 15** : Surat Balasan Izin Penelitian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
- Lampiran 16** : Izin Pengambilan Data Kepada Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 17** : Izin Pengambilan data Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
- Lampiran 18** : Izin Penelitian dari Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 19** : Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing I
- Lampiran 20** : Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing II
- Lampiran 21** : Lembar Revisi Seminar Proposal Penguji I
- Lampiran 22** : Lembar Revisi Seminar Proposal Penguji II

**Lampiran 23** : Lembar Revisi Seminar Proposal Pembimbing I

**Lampiran 24** : Lembar Revisi Seminar Proposal Pembimbing II

**Lampiran 25** : Lembar Persetujuan Seminar Proposal

**Lampiran 26** : Dokumentasi Wawancara

## **DAFTAR SINGKATAN**

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
Covid-19	: Corona Virus Disease 2019
WHO	: World Health Organization
BPS	: Badan Pusat Statistik
Disnakertrans	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumsel	: Sumatera Selatan
SDM	: Sumber Daya Manusia
PDB	: Produk Domestik Bruto
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
SILPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
APIP K/L	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/ Lembaga
Renstra	: Rencana Strategis
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
SAKTI	: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SPAN	: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Satker	: Satuan Kerja
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPTK	: Pertanggungjawaban Pelaksana Teknis Kegiatan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran negara disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Purwono, 2016:87). Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan alokasi sumber daya yang lebih baik, dengan cara memperkuat proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan dalam jangka menengah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran dengan meminimalkan penggunaan yang tidak perlu agar tercapainya tujuan yang diinginkan (Armala dan Pandoyo, 2020:12). Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu karena anggaran merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mengatur pembangunan sosial ekonomi, mewujudkan kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran juga sangat diperlukan karena keinginan masyarakat melebihi sumber daya yang tersedia dan juga untuk melihat bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat.

Perubahan anggaran atau *Rebudgeting* yaitu cara pemerintah untuk memenuhi cara yang beragam dari penganggaran, termasuk kontinuitas dan kontrol, perubahan dan akuntabilitas, sehingga *Rebudgeting* diperbolehkan dalam sebagian besar organisasi publik meskipun dalam kendala yang berbeda (Junita, 2015:369). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, Perubahan Anggaran terdiri atas:

- a. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran;
- b. Perubahan dan/atau pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan/atau; c. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.

Anggaran yang efektif terwujud apabila suatu anggaran yang telah disusun dapat direvisi kembali agar terciptanya tujuan dan sasaran yang tepat. Perubahan (revisi) anggaran tersebut tidak disajikan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui perubahan anggaran yang terjadi dalam APBN, sehingga masyarakat tidak dapat mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan APBN secara efektif.

Menurut Abdullah dalam Purwanto (2016:88), perubahan atas anggaran belanja terjadi karena prediksi atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tidak akurat, dan bersumber dari adanya perbedaan antara SILPA tahun A definitif setelah diaudit oleh BPK dengan SILPA tahun B, adanya pergeseran anggaran, perubahan dalam penerimaan khususnya pendapatan. Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika perkiraan yang ditetapkan pada saat penyusunan APBN harus direvisi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2016 point a mengatakan bahwa perubahan anggaran (Revisi) terdiri atas perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran. Lu dan Facer dalam Purwanto (2016:89), mengatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi perubahan anggaran (Revisi) adalah kondisi keuangan pemerintah dan sumber daya yang lemah. Dalam hal ini terjadinya perubahan anggaran (Revisi) belanja pada kegiatan kewirausahaan baru di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, disebabkan karena kondisi keuangan pemerintah

(negara) yang mengalami defisit yang semakin melebar sehingga terjadinya perubahan pagu anggaran yang disebabkan oleh Virus *Corona-19*.

Melihat keadaan yang menimpa dunia belakangan ini tepatnya dimulai pada akhir tahun 2019, telah diketahui adanya penyakit baru bernama *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan pandemi global atas *Covid-19* pada tanggal 11 Maret 2020. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 2 Maret 2020 nama Indonesia masuk ke dalam negara yang terjangkit virus *Covid-19*. Presiden Joko Widodo mengumumkan virus *Covid-19* dari Wuhan itu telah menjangkiti dua warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Secara global hingga saat ini pada tanggal 11 Januari 2021 penyebaran virus *Covid-19* sudah terkonfirmasi lebih dari 223 negara dan wilayah di seluruh dunia, terkonfirmasi yang positif *Covid-19* berjumlah lebih dari 89.048.345 orang, sedangkan yang meninggal dunia berjumlah lebih dari 1.930.265 orang.

Di Indonesia, data resmi pemerintah menunjukkan sebaran kasus positif sampai dengan 11 Januari 2021 terkonfirmasi ada lebih dari 828.026 kasus yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, ini menyebabkan kasus orang meninggal per harinya meningkat, per tanggal 11 Januari 2021 lebih dari 24.129 kasus orang meninggal dan lebih dari 681.024 orang sembuh, kemudian virus ini tersebar di lebih dari 510 kabupaten/kota serta di 308 transmisi lokal. Selain kesehatan masyarakat, aspek yang sangat terpengaruh oleh pandemi *Covid-19* adalah keuangan negara. Akibatnya, sumber keuangan negara untuk membiayai berbagai stimulus untuk menangani *Covid-19* terus tertekan di tengah-tengah pemasukan negara yang sedang menurun. Pemerintah menyadari bahwa dampak dari pandemi *Covid-19* akan sangat berbahaya untuk kedepannya sehingga kewaspadaan dalam menetapkan suatu kebijakan serta dalam hal pengelolaan Keuangan Negara harus dilakukan semaksimal mungkin.

Kebijakan *extraordinary* kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 yang telah disahkan pada bulan April 2020 lalu. Virus *Covid-19* sangat berdampak tidak hanya dalam kesehatan tetapi pada perekonomian Indonesia. Selanjutnya dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yakni PMK nomor 23 Tahun 2020 dan PMK nomor 28 Tahun 2020 yang mengatur tentang insentif kebijakan fiskal dalam rangka menghadapi pandemi *Covid-19*.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terjadi pada masa pandemi ini dimana terjadi peningkatan jumlah data kemiskinan setiap harinya. Saat ini di Indonesia jumlah masyarakat miskin mengalami peningkatan sekitar 9,78 persen meningkat 0,56 persen point terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia kian hari kian bertambah jumlahnya, sehingga perlunya perhatian khusus dari pemerintah dalam hal ini untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengakui *Covid-19* telah memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia hampir di seluruh sendi kehidupan baik dalam aspek pendidikan yang mengharuskan belajar daring di rumah masing-masing, ekonomi yang semakin melemah, sosial masyarakat yang mendapat tekanan untuk melanjutkan hidup dalam masa yang sulit karena adanya pandemi *Covid-19* ini dan kemungkinan-kemungkinan lainnya yang dapat merugikan masyarakat.

Angka kemiskinan pada tahun 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Provinsi Sumatera Selatan berada pada angka 12,56 persen. Angka kemiskinan ini berada di atas angka nasional yakni 9,8 persen. Jika dengan estimasi jumlah penduduk Sumatera

Selatan saat ini berada pada kisaran 8 jutaan, maka dapat diperkirakan penduduk Sumatera Selatan yang berada di bawah garis kemiskinan adalah sekitar satu juta jiwa. Masyarakat miskin yang berada di Sumatera Selatan perlu secepatnya ditangani oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri. Berikut penjelasan tentang kondisi kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2009-2019:

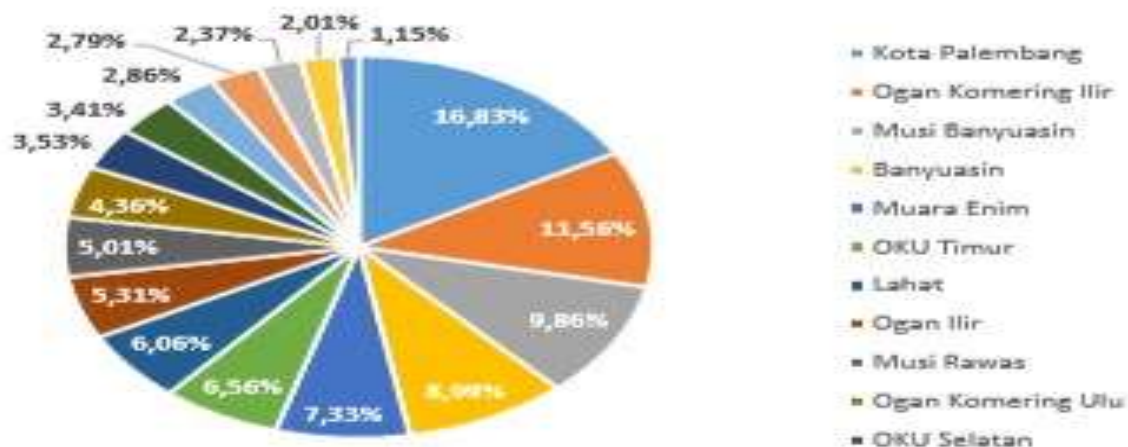
**Gambar 1 Tren Persentase Kemiskinan Sumsel dan Nasional September 2009-2019**



*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Gambar di atas menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan setiap tahunnya menurun (15,68 persen pada September 2009-12,56 persen pada September 2019), namun lajunya lambat. Selama periode 2009-2019 sebesar 62.840 penduduk miskin Sumatera Selatan telah keluar dari garis kemiskinan atau 6.284 per tahun. Persentase kemiskinan Sumatera Selatan di pedesaan yaitu 12,93 persen lebih tinggi dari perkotaan yaitu 11,94 persen. Pola ini sama dengan Nasional.

**Gambar 2 Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2019 Provinsi Sumsel**  
**Share Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar di atas menjelaskan tentang jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan pada tahun 2019 diantaranya, Kota Palembang (16,83 persen), Ogan Komering Ilir (11,56 persen), Musi Banyuasin (9,86 persen), Banyuasin (8,99 persen), Muara Enim (7,33 persen), OKU Timur (6,56 persen), Lahat (6,06 persen), Ogan Ilir (5,31 persen), Musi Rawas (5,01 persen), Ogan Komering Ulu (4,36 persen), OKU Selatan (3,53 persen). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Sumsel pada tahun 2019 tidak merata di setiap daerahnya, tentu saja ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan dalam pembangunan Provinsi Sumatera Selatan kedepannya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, melalui Disnakertrans Provinsi Sumsel. Salah satu alternatif upaya dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan adalah menciptakan masyarakat miskin yang mampu dan terampil secara mandiri dalam berwirausaha. Disnakertrans Provinsi SumSel menjadi wadah untuk melatih orang-orang yang mau untuk berwirausaha sehingga nantinya akan dilatih tentang bagaimana caranya untuk membangun usaha yang produktif misalnya dari segi SDM nya maupun produksinya melalui Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dalam bidang Pelatihan dan

Produktivitas. Pelatihan kewirausahaan yang dilakukan yaitu di kabupaten Banyuwasin dengan melakukan pelatihan agar dapat menumbuhkan jiwa wirausaha baru melalui pemanfaatan potensi daerah yang dimiliki.

Mewujudkan wirausahawan yang produktif tentunya harus berdasarkan tujuan dan target yang telah ditentukan oleh instansi tersebut yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yaitu melalui penyusunan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran. Akan tetapi karena mewabahnya *Covid-19* pada awal tahun 2021 menyebabkan berbagai dampak khususnya terhadap keadaan ekonomi nasional sehingga adanya dana yang dialihkan untuk penanganan *Covid-19*. Pemerintah melakukan revisi pertama APBN pada April 2020 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pada bulan Juni pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020. Dalam revisi ini defisit meningkat drastis dari sebelumnya 1,76 persen di APBN 2020 menjadi 5,07 persen di revisi pertama. Pada revisi kedua defisit APBN semakin melebar menjadi 6,34 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan nilai Rp 1.039 triliun yang menyebabkan menurunnya penerimaan negara dari sisi pajak, bea cukai dan PNBPN serta meningkatnya belanja yang dibutuhkan untuk penanganan *covid-19*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi *Covid-19* dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara menyebabkan dilakukan perubahan terhadap postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 2 berupa perubahan rincian besaran seperti a. Anggaran

Pendapatan Negara; b. Anggaran Belanja Negara; c. Surplus/Defisit Anggaran; d. Pembiayaan Anggaran. Perubahan rincian tersebut menyebabkan adanya perubahan Anggaran Belanja kegiatan kewirausahaan baru di Disnakertrans Provinsi Sumsel yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kegiatan Kewirausahaan Baru mengelola dana APBN yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai wujud pengelolaan keuangan negara dalam rangka pengelolaan kekayaan negara. Rincian DIPA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel 1 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1 Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Kewirausahaan Baru Tahun Anggaran 2020**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>
521211	Belanja Bahan	32.500.000	18.650.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.000.000	1.500.000
522151	Belanja Jasa Profesi	8.400.000	6.800.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.000.000	20.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.600.000	8.800.000
	<b>Total</b>	<b>111.500.000</b>	<b>55.750.000</b>

*Sumber: Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan: Diolah oleh penulis*

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat kita lihat bahwa pagu anggaran sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 111.500.000 dan setelah perubahan pagu anggarannya menjadi Rp. 55.750.000. Itu artinya bahwa selisih perubahan anggaran sebelum perubahan dengan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 55.750.000 atau sama dengan 50 persen dari pagu anggaran sebelum perubahan yang telah dialokasikan untuk *covid-19*. Belanja barang dan jasa pada tabel 1 tersebut di atas berdampak terhadap volume kegiatan menjadi berkurang dan juga berdampak kepada jumlah kewirausahaan yang akan dilatih. Apabila anggarannya berubah maka ilmu tentang produktivitas yang diberikan akan berdampak. Dalam kegiatan kewirausahaan baru akan



dilatih bagaimana caranya membangun usaha yang produktif dari potensi daerah yang dimiliki. Kegiatannya yaitu mengumpulkan orang-orang yang mau untuk berwirausaha. Akibat *covid-19* adanya kesulitan tersendiri untuk mengumpulkan orang-orang yang mau berwirausaha dikarenakan penyebaran *covid-19* yang semakin tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan setelah triwulan 3 dibulan juli dari sebelum perubahan sebanyak 4 paket atau 80 orang menjadi 2 paket atau 40 orang yang dilatih; 1 paket 20 orang (wawancara dengan kepala seksi kegiatan kewirausahaan).

Berkurangnya pagu anggaran belanja barang dan jasa kegiatan Kewirausahaan Baru di Disnakertrans Provinsi Sumsel mengakibatkan volume kegiatannya berkurang sehingga ingin diteliti apakah dalam proses penyusunan itu prinsip-prinsip anggaran itu masih bisa ditegakkan atau tidak yaitu dilihat atau difokuskan dari segi penyusunannya dan ingin diketahui bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam merevisi anggaran itu sehingga perlu diteliti lebih dalam terkait “Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan kewirausahaan Baru di Masa Pandemi *Covid-19* Tahun Anggaran 2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana Proses Penyusunan Perubahan (Revisi) Anggaran Belanja Kegiatan Kewirausahaan Baru di Masa Pandemi *Covid-19* Tahun Anggaran 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menggambarkan Proses Penyusunan Perubahan (Revisi) Anggaran Belanja Kegiatan Kewirausahaan Baru di Masa Pandemi *Covid-19* Tahun Anggaran 2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan konsep bagi ilmu pengetahuan pada ilmu administrasi publik khususnya tentang keuangan negara.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan terutama dalam implementasi penyusunan perubahan (Revisi) anggaran yaitu berupa konsep proses penyusunan perubahan (Revisi) anggaran di masa pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bastian, Indra. 2013. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Frangky, Slamet. 2014. *Dasar-dasar Kewirausahaan*. Jakarta : Indeks.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2016. *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Syafri. 2001. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irham, Fahmi. 2013. *Kewirausahaan Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfa beta.
- Mahmudi. 2015. *Managemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Managemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddy dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, S.P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan Cetakan Kelima*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Managemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparmoko, M. 2011. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik Edisi Keenam*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.

## Skripsi

- Ritonga, Bangun. 2015. Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Tidak dipublikasikan. Medan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Sumatera Utara.
- Kurniasih, Wiwin. 2016. Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Dinas Kesehatan yang Bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya. Tidak dipublikasikan. Tasikmalaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

## Jurnal

- Abdullah, Syukriy, dkk. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Magister akuntansi*. 3(3):47-48.
- Andrianto. 2015. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimodirasi Oleh Variabel Desentralisasi Dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi*. 20(3):65.
- Armala, Siti dan Pandoyo. 2020. Implementasi PP No 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Pada Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. *Jurnal ekonomi, manajemen, bisnis dan sosial*. 1(1):12-15.
- Astria, Febrina. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen*. 15(2):140.
- Hariadi, Agato, P.K. 2018. Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*. 7(11):3-4.
- Junita, Afrah. 2015. Perubahan Anggaran, Partisipasi Anggaran, dan Gaya Kepemimpinan Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*. 2(2): 369.
- Kadir, Adul. 2016. Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi*. 1(1): 32.
- Purwanto, Agus. 2016. Pengaruh Kondisi Keuangan dan Politik Terhadap Anggaran Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal akuntansi dan bisnis*. 16(2): 87-88.

## Peraturan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *covid-19*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 Perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara